

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	Satuan	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	
										TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Tujuan : Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto					19,16		Persen				19,16	Kepala Dinas	
2	Sasaran : Meningkatnya Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota			4,720,926,000		9,75		Persen				9,75	Kepala Dinas	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP DPMPTSP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4,607,926,000	Nilai SAKIP DPMPTSP (BB)	71	1	Memastikan pelaksanaan penguatan kapabilitas Core Value ASN	Persen	19.18	38.37	57.55	71.35	Kepala Dinas
						Nilai IKM DPMPTSP	90	1	Memastikan survey kepuasan masyarakat pada penerima layanan terlaksanakan yang sesuai	Persen	22.57	45.14	67.70	90.27	
	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12,000,000										
						Jumlah dokumen perencanaan, yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	6			Dokumen	3	1	2	Perencana Ahli Pertama	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,000,000										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4			Dokumen	2	1	1	Perencana Ahli Pertama, dan Penata Layanan Operasional	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,000,000										
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2			Laporan	1		1	Perencana Ahli Pertama, dan Penata Layanan Operasional	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,653,430,671										
						Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12			bulan	3	3	3	Kepala Subbagian Umum	
				Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	3,638,930,671										
						Jumlah orang/bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28	Menyediaan dan memastikan Gaji dan Tunjangan ASN terpenuhi	Orang/ Bulan	28	28	28	28	Bendahara, Pengelola, dan Layanan Operasional Operator Layanan Operasional	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14,500,000										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan keuangan SKPD	6	Menyusun dokumen penatausahaan dan keuangan per bulan/triwulan/tahunan	Dokumen	2	1	2	1	Penelaah Teknis Kebijakan, Bendahara, Pengelola, dan Layanan Operasional Operator Layanan Operasional	

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	Satuan	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
										TW I	TW II	TW III	TW IV	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20,000,000									
						Persentase pemenuhan kebutuhan diklat dan pelatihan pegawai	100		Persen				100	Kepala Subbagian Umum
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000									
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35	Meningkatnya jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	8	8	8	11	Pengadministrasi Perkantoran
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30	Memenuhi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai pada tahun anggaran	Orang				30	Pengadministrasi Perkantoran
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		92,761,453									
						Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12		Bulan	3	3	3	3	Kepala Subbagian Umum
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,000,000									
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Paket	1				Analisis Perencanaan, evaluasi, dan Pelaporan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,000,000									
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	Menyediakan bahan logistik kantor	Paket	1				Analisis Perencanaan, evaluasi, dan Pelaporan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,000,000									
						Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Menyediakan cetakan dan penggandaan	Paket	1				Analisis Perencanaan, evaluasi, dan Pelaporan
				Penyediaan Bahan Material	14,261,453									
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1	Menyediakan bahan/material	Paket	1				Analisis Perencanaan, evaluasi, dan Pelaporan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35,000,000									
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Menyediakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	3	3	3	3	Analisis Perencanaan, evaluasi, dan Pelaporan
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,500,000									
						Melaksanakan tata kelola arsip dinamis SKPD	25	Menyusun Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	6	7	6	Analisis Perencanaan, evaluasi, Pelaporan, Arsiparis Terampil, dan Operator Layanan Operasional

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	Satuan	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
										TW I	TW II	TW III	TW IV	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		30,000,000									
						Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2		Unit		2			Kepala Subbagian Umum
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000									
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	Mengadakan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan rencana yang telah disepakati	Unit		2			Pengadministrasi Perkantoran
						Jumlah dokumen pengadaan E-Purchasing yang diproses tepat waktu dan sesuai prosedur	8	Terselenggaranya pengadaan barang/jasa melalui e-Katalog sesuai ANGKAS (Cetak, ATK, Komponen Listrik, Komputer, Natura, Makan Minum Rapat & Tamu)	Dokumen	2	2	2	2	Pengadministrasi Perkantoran
						Jumlah laporan BMD yang disusun dan disampaikan tepat waktu (Triwulan & Tahunan)	2	Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Dokumen		1		1	Pengadministrasi Perkantoran
						Jumlah dokumen belanja modal BMD yang diproses dan ditetapkan menjadi aset	3	Terselenggaranya belanja modal Barang Milik Daerah (BMD)	Dokumen		3			Pengadministrasi Perkantoran
						Jumlah dokumen persediaan yang diinput dan tervalidasi pada aplikasi SIMPAN Kabupaten Kebumen	4	Tertib penatausahaan barang persediaan operasional kantor	Dokumen	1	1	1	1	Pengadministrasi Perkantoran
			Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		645,233,876									
						Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12		Bulan	3	3	3	3	Kepala Subbagian Umum
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000									
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Menyusun laporan surat menyurat	Laporan				1	Analisis Perencanaan, evaluasi, dan Pelaporan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200,846,876									
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12	Menyusun laporan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Laporan	3	3	3	3	Analisis Perencanaan, evaluasi, dan Pelaporan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443,387,000									
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Menyusun laporan pelayanan umum kantor sesuai dengan rencana yang telah disepakati	Laporan	3	3	3	3	Analisis Perencanaan, evaluasi, dan Pelaporan

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	Satuan	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
										TW I	TW II	TW III	TW IV	
			Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		154,500,000									
						Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	44		Unit	11	11	11	11	Kepala Subbagian Umum
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111,000,000									
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12	Melaksanakan pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	3	3	3	3	Analisis Perencanaan, evaluasi, dan Pelaporan
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	5	5	5	5	Pengelola Umum Operasional
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,000,000									
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin	Unit	3	3	2	2	Analisis Perencanaan, evaluasi, dan Pelaporan
						Pemeliharaan sistem dan jaringan	97%	Persentase uptime jaringan internet loket pelayanan	Persen	97%	97%	97%	97%	Pranata Komputer Mahir
						Layanan dukungan teknis	100%	Persentase penyelesaian permasalahan teknologi informasi dan komunikasi	Persen	100%	100%	100%	100%	Pranata Komputer Mahir
						Keamanan data	100%	Persentase insiden keamanan yang tertangani	Persen	100%	100%	100%	100%	Pranata Komputer Mahir
				Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17,500,000									
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1				Analisis Perencanaan, evaluasi, dan Pelaporan, operator layanan operasional
4	Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Kebumen	Nilai realisasi investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		-	Nilai realisasi investasi	825	Memastikan terselenggaranya kegiatan promosi sesuai yang telah direncanakan	Miliar Rupiah				825	Kepala Dinas
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		-									Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
				Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-									
						Tersusunnya Draft Kajian Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2045	1	Jumlah dokumen Draft Kajian Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2045	Dokumen				1	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	Satuan	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
										TW I	TW II	TW III	TW IV	
4	Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Kebumen	Nilai realisasi investasi	Program Promosi Penanaman Modal		71,000,000	Nilai realisasi investasi	825	Memastikan terselenggaranya kegiatan promosi sesuai yang telah direncanakan	Miliar Rupiah				825	Kepala Dinas
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		71,000,000									
						Dokumen kepeminatan penanaman modal kabupaten/kota	2		Dokumen				2	Penata Penanaman Modal Ahli Muda
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	71,000,000									
						Nilai realisasi investasi	825	1 Menyusun hasil analisis materi, bentuk, dan promosi penanaman modal daerah	Miliar Rupiah				825	Penata Penanaman Modal Ahli Muda
						Tersusunnya laporan perkembangan realisasi penanaman modal	4	2 Menyusun dokumen laporan perkembangan realisasi penanaman modal	Dokumen	1	1	1	1	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, Pengadministrasi Keuangan
						Melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	2	3 Menyusun dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Dokumen			1	1	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, dan Penata Layanan Operasional
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal		-	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2,200	1 Memastikan pelaksanaan layanan perizinan dan nonperizinan berjalan sesuai standar operasional prosedur	Pelaku usaha	550	1100	1650	2200	Kepala Dinas
			Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		54,000,000									
						Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan perizinan berusaha melalui sistem terintegrasi berbasis elektronik	4,000		Dokumen	1000	1000	1000	1000	Penata Perizinan Ahli Muda
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6,000,000									
						Tersusunnya dokumen perencanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan	2	Menyusun SOP pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	Dokumen		1		1	Penata Perizinan Ahli Pertama
				Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40,000,000									
						Terlaksananya pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan	4,000	Jumlah pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan	Pelaku Usaha	1000	1000	1000	1000	Penata Perizinan Ahli Pertama
						Terlaksananya pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan	2,200	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan keabsahan dan kelayakan permohonan izin	Dokumen	550	550	550	550	Penata Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Operator Layanan Operasional
						Terlaksananya pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan	1,500	1 Melayani permohonan SIP pada MPP Digital diverifikasi sesuai ketentuan	Dokumen	375	375	375	375	Penata Perizinan Ahli Muda

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	Satuan	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
										TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Terlaksananya pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan	400	2 Melakukan pelayanan permohonan PKKPR berusaha pada OSS RBA yang diverifikasi sesuai ketentuan	Dokumen	100	100	100	100	
						Terlaksananya pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan	100	3 Melakukan pelayanan permohonan PKKPR Non berusaha, izin trayek, sertifikat penyuluhan kewanaman pangan dan pencabutan SIP pada SIPERI yang diverifikasi sesuai ketentuan	Pemohonan	25	25	25	25	Penata Perizinan Ahli Muda
						Terlaksananya pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan	400	4 Melaksanakan pelayanan PBG dan SLF yang diterbitkan sesuai ketentuan	Dokumen	100	100	100	100	Penata Perizinan Ahli Muda
						Terlaksananya pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan	4	5 Melaksanakan pelayanan hasil analisis kebutuhan layanan, permasalahan pelayanan, dan rekomendasi perbaikan layanan	Dokumen	1	1	1	1	Penata Perizinan Ahli Muda
						Terlaksananya pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan	4	6 Penyusunan dokumen materi informasi pelayanan perizinan berusaha, perizinan berusaha dan nonperizinan yang disampaikan kepada masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	Penata Perizinan Ahli Muda
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	8,000,000									
						Tersedianya laporan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan	4	Jumlah laporan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	Penata Perizinan Ahli Pertama
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		34,000,000	Kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan	60	1 Memastikan pelaksanaan pengawasan pada kegiatan usaha agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kegiatan Usaha	15	15	15	15	Kepala Dinas
			Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		34,000,000									
						Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	90		Kegiatan Usaha	22	24	22	22	Penata Penanaman Modal Ahli Muda
				Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	14,000,000									
						Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan	30	Terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan	Kegiatan Usaha	7	9	7	7	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
				Pengawasan Penanaman Modal	20,000,000									
						Kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan	60	2 Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah	Kegiatan Usaha	15	15	15	15	Penata Penanaman Modal Ahli Muda
						Terlaksananya Kegiatan Usaha yang telah terverifikasi dan dilakukan Pengendalian		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha					Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	Satuan	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
										TW I	TW II	TW III	TW IV	
6	Terwujudnya penyelenggaraan perizinan berbasis elektronik	Persentase layanan terintegrasi (OSS-RBA, MPP Digital, SimBG, Siperi)	Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal		8,000,000	Dokumen perizinan dan nonperizinan	7	1 Memastikan tersusunnya dokumen kajian, evaluasi, dan pelaporan perizinan berusaha	Dokumen	1	2	1	3	Kepala Dinas
			Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		8,000,000									
						Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	6		Dokumen					Penata Perizinan Ahli Madya
				Pengolahan, penyediaan, dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	8,000,000									
						Persentase layanan terintegrasi (OSS-RBA, MPP Digital, SimBG, Siperi)	2	1 Melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	Dokumen	1		1		Penata Perizinan Ahli Madya
						Persentase layanan terintegrasi (OSS-RBA, MPP Digital, SimBG, Siperi)	1	2 Penyusunan rencana pelayanan perizinan	Dokumen	1				Penata Perizinan Ahli Madya
						Persentase layanan terintegrasi (OSS-RBA, MPP Digital, SimBG, Siperi)	4	3 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	1	1	1	1	Penata Perizinan Ahli Madya

Keterangan

- (1) Sasaran disesuaikan dengan Cascading Jabatan
JPT : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

